

Implementation of E-Government Through The Village Information System (SID) In Kureksari Village, Waru Subdictrict, Sidoarjo Regency

[Implementasi E-Government Melalui Sistem Informasi Desa (SID) Pada Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo]

Fellita Intan Putri Purnomo¹⁾, Lailul Mursyidah²⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: fellitaintan@gmail.com, lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze and describe the implementation of E-Government through the Village Information System (SID) in Kureksari Village, Waru District, Sidoarjo Regency in supporting digital-based public services. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation with informants consisting of village officials and community members who use the services. The data analysis technique used the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation of SID in Kureksari Village that In the benefit indicator, the system has provided access to information and administrative services, but its utilization is still limited. In the efficiency indicator, administrative services have not been fully conducted through SID due to technical constraints, so some services are still carried out manually or through other applications. In the participation indicator, community involvement in utilizing SID is still low due to a lack of understanding and socialization. In the transparency indicator, the village website has provided information related to the village profile, activities, and budget, but information updates are not carried out regularly. Meanwhile, in the change management indicator, limited human resource capacity and the lack of continuous training are obstacles in managing the system. Therefore, it is necessary to improve the capacity of village officials, improve the system, and increase community socialization so that the implementation of SID can run more optimally in supporting digital-based public services.*

Keywords - Village Information System, Public Service, E-Government, Village Government

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi E-Government melalui Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat pengguna layanan. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SID Pemerintah Desa Kureksari bahwa Pada indikator manfaat, sistem telah menyediakan akses informasi dan layanan administrasi, namun pemanfaatannya masih terbatas. Pada indikator efisiensi, pelayanan administrasi belum sepenuhnya dilakukan melalui SID karena masih terdapat kendala teknis sehingga sebagian layanan masih dilakukan secara manual atau melalui aplikasi lain. Pada indikator partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan SID masih rendah karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi. Pada indikator transparansi, website desa telah memuat informasi terkait profil desa, kegiatan, dan anggaran, namun pembaruan informasi belum dilakukan secara rutin. Sementara itu, pada indikator manajemen perubahan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan pelatihan yang belum berkelanjutan menjadi kendala dalam pengelolaan sistem. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, perbaikan sistem, serta sosialisasi kepada masyarakat agar penerapan SID dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital.*

Kata Kunci - Sistem Informasi Desa, Pelayanan Publik, E-Government, Pemerintah Desa

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan upaya masyarakat, hak asal dan tradisional yang diterima dan dihargai dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kekuasaan sendiri untuk mengurus semua urusan pemerintahan dan kepentingan warga setempat, termasuk dalam

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

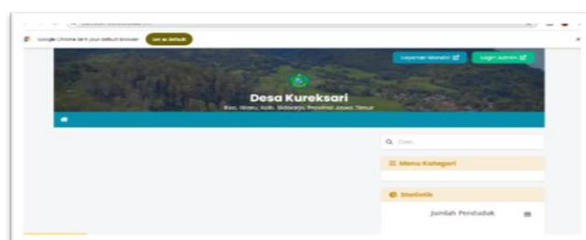
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

menyelenggarakan pelayanan publik di wilayah desa tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan mengenai desa satu kesatuan hukum masyarakat dengan batas wilayah tertentu, yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menangani urusan serta kepentingan pemerintah warga setempat. Desa berfungsi sebagai bagian utama yang tidak terpisahkan dari pengelolaan pemerintah pusat [1]. Desa merupakan pemetaan pada wilayah administratif di Indonesia serta terdapat di bawah sub-bagian dengan dipimpin dari seorang kepala desa. Sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, sistem teknologi informasi terdapat fungsi secara penting bagi instansi pemerintahan atau sektor swasta. Memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilannya suatu organisasi [2]. Maka dari itu sebagai perangkat desa dan cara memanfaatkan data informasi dalam membantu pelayanan masyarakat desa serta pengelolaan sumber daya.

Sistem Informasi Desa (SID) adalah aplikasi yang dapat membantu desa untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengelola desa yang maju dan mandiri. Sistem informasi desa juga dapat membuat layanan pemerintah lebih mudah diakses oleh masyarakat umum [3]. Sistem Informasi ini berbasis teknologi yang menggunakan komputer dan website sehingga masyarakat desa dapat mudah untuk mengasesnya [4]. Dalam Undang- Undang Desa pasal 86 ayat (2) dan ayat (5) mewajibkan pemerintah serta pemerintah daerah untuk membangun Sistem Informasi Desa (SID), yang akan dikelola oleh pemerintah desa demi memudahkan masyarakat desa dan pihak berkepentingan lainnya dalam mengaksesnya [5]. Salah satu manfaat utama penggunaan Sistem Informasi Desa SID adalah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi desa. Melalui SID, data administrasi seperti data penduduk dan data pelayanan dapat dikelola secara terintegrasi dalam bentuk elektronik. Hal ini mengurangi penggunaan cara manual yang cenderung memakan waktu lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Dengan pemanfaatan SID, kualitas data desa menjadi lebih baik, serta waktu dan sumber daya dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien.

Pembuatan website Sistem Informasi Desa (SID) merupakan langkah awal dalam penerapan E-Government di tingkat desa yang bertujuan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan pelayanan dari pemerintah desa. Penerapan E-Government sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government, yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penerapan sistem digital diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah daerah mendorong pengelolaan pemerintahan desa yang terintegrasi berbasis teknologi informasi. E-Government bertujuan mengintegrasikan berbagai lembaga pemerintahan serta mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan, sehingga diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kapasitas manajemen, serta mendorong pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Penerapan Sistem Informasi Desa SID Pemerintah Desa Kureksari telah diwujudkan melalui penyediaan website resmi desa sebagai media pelayanan informasi dan administrasi kepada masyarakat. Website tersebut digunakan untuk menampilkan informasi profil desa, data kependudukan, berita kegiatan, serta layanan administrasi secara digital. Keberadaan SID Pemerintah Desa Kureksari masih belum berjalan secara optimal. Pembaruan data belum dilakukan secara rutin, tingkat pemanfaatan oleh masyarakat masih rendah, serta terdapat kendala teknis seperti gangguan sistem dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi, sehingga efektivitas pelayanan digital belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut diperkuat oleh tampilan website SID pada Gambar 1 yang menunjukkan bahwa sistem secara teknis sistem telah tersedia dan dapat diakses oleh publik, namun pemanfaatan fitur layanan dan pembaruan informasi belum sepenuhnya berjalan secara optimal.



Gambar 1. Tampilan Sistem Informasi Desa

Sumber 1: <https://kureksari-waru.desa.id/> (2025)

Gambar 1 menampilkan halaman utama website Sistem Informasi Desa (SID) Desa kureksari yang memuat identitas desa, menu layanan mandiri, login admin, fitur pencarian, serta statistik kependudukan. Tampilan tersebut menunjukkan bahwa secara teknis Sistem Informasi Desa telah tersedia dan dapat diakses oleh publik sebagai media penyedia informasi dan pelayanan administrasi desa berbasis digital. Keberadaan website ini menjadi bukti awal

penerapan E-Government di tingkat desa serta menunjukkan kesiapan infrastruktur sistem informasi yang dimiliki pemerintah Desa Kureksari. Fitur yang tersedia pada website Pemerintah Desa Kureksari melalui Sistem Informasi Desa (SID) meliputi menu Profil Desa yang berisi sejarah desa, visi dan misi, struktur organisasi pemerintahan desa, serta data kelembagaan. Selain itu terdapat menu Data Kependudukan yang menampilkan statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan kategori sosial lainnya. Pada bagian Layanan Mandiri, masyarakat dapat mengakses informasi terkait pengajuan surat keterangan seperti surat domisili, surat pengantar nikah, surat keterangan usaha, serta administrasi kependudukan. Website SID juga memuat menu Berita dan Kegiatan Desa yang berisi informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa, agenda musyawarah, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta dokumentasi program pembangunan. Selain itu, tersedia informasi monografi desa, potensi desa, serta publikasi laporan anggaran dan rencana pembangunan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Keberadaan fitur pencarian (search engine) dan statistik pengunjung turut mendukung kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian, pembaruan konten dan optimalisasi pemanfaatan fitur-fitur tersebut masih belum dilakukan secara rutin sehingga fungsi informatif dan pelayanan digital belum berjalan secara maksimal. Untuk memperjelas kondisi faktual tersebut, peneliti menyajikan temuan data Tabel 1 tersebut menggambarkan situasi umum pemanfaatan SID beserta beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaannya.

Tabel 1. Kondisi Pengguna Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa Kureksari

Aspek Penggunaan SID	Kondisi Nyata Pemerintah Desa Kureksari	Keterangan
Pembaruan data Kependudukan	Tidak Rutin, terakhir 2023	Belum Optimal
Upload Berita Kegiatan Desa	Jarang dilakukan	Kurang Partisipasi Perangkat
Pelayanan Administrasi Online	Masih dilakukan manual	Keterbatasan SDM
Akses Masyarakat ke website	Rendah	Minim Sosialisasi

Sumber 2 : Hasil Observasi dan Wawancara Penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat gambaran kondisi penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa Kureksari yang meliputi aspek pembaruan data kependudukan, pengelolaan informasi kegiatan desa, pelayanan administrasi, serta tingkat akses masyarakat terhadap website desa. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa Kureksari Berdasarkan observasi di lapangan terdapat beberapa masalah tahapsistem sudah tersedia. Tetapi belum dimanfaatkan secara optimal, pelayanan administrasi masih di backup oleh system lain, sehingga transparansi belum maksimal, partisipasi digital masyarakat masih rendah, pelatihan dan kesiapan SDM masih terbatas.

Berbagai penelitian terdahulu dengan menjelaskan Sistem Informasi Desa (SID). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erwin Mardinata, Tomy Dwi Cahyono, & Reza Muhammad Rizqi 2023 yang berjudul “Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat.”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SID mampu meningkatkan efisiensi administrasi desa, pengelolaan data aset, transparansi, serta akses informasi dan partisipasi masyarakat, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, koneksi internet yang tidak stabil, dan rendahnya pemahaman sumber daya manusia [6]. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada proses pengembangan dan pendampingan sistem, sementara penelitian ini berfokus pada analisis penerapan dan optimalisasi SID sebagai bagian dari implementasi E-Government pemerintah Desa Kureksari.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Romi Hendri & Eva Itma Anna pada tahun 2024 yang berjudul “Sistem Informasi Pengenalan Desa Sumber Agung Lampung Utara Berbasis Web”. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian pengembangan sistem dengan pendekatan Unified Modeling Language (UML) dan model Waterfall, yang dilakukan melalui tahapan analisis sistem, desain sistem, implementasi, serta pengujian menggunakan metode Black-Box Testing, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis web yang dikembangkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi desa serta melakukan pengajuan layanan administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor desa, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik [7]. Kemudian adanya penelitian tersebut ini terletak pada fokus pemanfaatan sistem informasi desa berbasis web dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek perancangan dan pengembangan sistem secara teknis, sementara penelitian ini berfokus pada analisis penerapan dan optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) sebagai bagian dari implementasi E-Government Pemerintah Desa Kureksari.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budi Arman Arsad, dkk pada tahun 2022 yang berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) Berbasis Website di Desa Rempek Darussalam Kabupaten Lombok Utara”. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian jenis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa

pengembangan SID berbasis website mampu meningkatkan akses informasi publik, transparansi pemerintahan desa, serta mempermudah pengelolaan data desa, khususnya terkait profil desa, potensi desa, data kependudukan, dan informasi geografis [8]. Selanjutnya adanya kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai upaya peningkatan pelayanan publik dan transparansi desa, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada proses pengembangan website dan pengisian konten informasi desa, sementara penelitian ini berfokus pada analisis penerapan dan optimalisasi SID sebagai bagian dari implementasi E-Government di Pemerintah Desa Kureksari.

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Shintya Kurniawan & lailul Mursyidah pada tahun 2024 yang berjudul “efektivitas sistem informasi dalam pelayanan publik di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi belum optimal karena pelayanan administrasi belum sepenuhnya digital dan masih terdapat kendala pemanfaatan sistem. Persamaan penelitian terletak pada penggunaan metode kualitatif dan fokus pada system informasi, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus kajian, dimana penelitian ini menekankan pada penerapan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai bagian dari implementasi e-government di Pemerintah Desa Kureksari [9].

Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan ideal penerapan Sistem Informasi Desa dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Keterbaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang menilai secara langsung bagaimana Sistem Informasi Desa (SID) diterapkan dan dimanfaatkan di tingkat desa. Penelitian ini melihat penerapan SID dari tiga aspek utama, yaitu kesiapan sumber daya manusia, kendala teknis pada sistem, dan tingkat partisipasi masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas sisi teknis atau pengembangan sistem, penelitian ini menekankan pada kondisi nyata pemanfaatan SID dalam pelayanan publik desa. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan penerapan E-Government guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan SID Pemerintah Desa Kureksari, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta menilai tingkat optimalisasi sistem dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital.

E-Government adalah metode baru bagi pemerintah untuk melibatkan teknologi informasi dan berkomunikasi bersama masyarakat serta pihak lain yang memiliki kepentingan. Penelitian tersebut menggunakan teknologi, utamanya internet, dalam memperbaiki kualitas pelayanan [10]. Dasar dari ide intinya adalah penggunaan informasi teknologi untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan beberapa subjek, mencakup masyarakat, pelaku usaha, maupun lembaga yang lain [11]. Berdasarkan pendapat Indrajit (2002) E-Government adalah sebuah sistem terbaru diantara pemerintah terhadap masyarakat maupun kelompok lainnya dengan memiliki kepentingan dimana akan melibatkan suatu pemanfaatan teknologi yaitu internet. Dalam tujuan memperbaiki, mengembangkan efisiensi dan kualitas untuk pelayanan yang dijalankan diantaranya implementasi Sistem Informasi Desa (SID). Dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi E-Government, di mana Indrajit (2005:46) menyatakan apa yang diistilahkan balanced E-Government Scorecard yaitu sebuah alat ukur atau kerangka evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi E-Government berjalan secara efektif dan seimbang. Sebagai kerangka penilaian implementasi yang mencakup lima indikator utama, yaitu 1)Manfaat 2) Efisiensi 3)Partisipasi 4)Transparansi 5) Menejemen Perubahan [12]. Jika dikaitkan dengan kondisi Pemerintah Desa Kureksari, implementasi SID masih menunjukkan Rendahnya pemanfaatan SID mencerminkan lemahnya aspek partisipasi, sementara belum optimalnya pelayanan digital menunjukkan bahwa efisiensi dan manfaat sistem belum dirasakan secara maksimal. Selain itu, keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam mengelola sistem mengindikasikan belum optimalnya manajemen perubahan dalam menghadapi transformasi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa Kureksari sebagai bagian dari implementasi e-government dalam pelayanan publik. Penelitian ini mengkaji sejauh mana SID dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan [13]. Selain itu, Penelitian ini mengidentifikasi kendala teknis, kesiapan sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan SID. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran kondisi pemanfaatan SID di tingkat desa serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis digital.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan untuk memahami fenomena nyata berdasarkan data non-numerik.. Menurut [14], penelitian kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan suatu fenomena sosial secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Fokus penelitian ini diarahkan pada penerapan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai bagian dari implementasi E-

Government di tingkat desa. Aspek yang menjadi perhatian utama mencakup efektivitas penggunaan SID dalam pelayanan publik, hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam penerapannya, serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan sistem tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini dipilih karena hasil observasi awal menunjukkan bahwa pelaksanaan SID di desa tersebut belum optimal. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci dan observasi di lapangan mengenai penerapan SID. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa sumber dokumen pendukung, seperti dokumentasi kegiatan, tampilan website dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat kajian teoritis dan kontekstual. Untuk pengumpulan data, proses pengumpulan data [15] Peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan di Kantor Desa Kureksari melalui sekretaris desa, sedangkan observasi dilakukan dengan langsung ke lokasi untuk mengetahui cara menerapkan E-Government melalui SID, dan dokumentasi dilakukan dengan merekam suara dan merekam data. Teknik penentuan informan menggunakan Teknik Purposive Sampling yaitu untuk mendapatkan informasi dari orang-orang yang memahami penelitian. Untuk penelitian ini, kami menggunakan pengambilan sampel yang dimaksudkan, yang merupakan teknik pemilihan informan dengan sengaja sesuai dengan kriteria khusus yang terkait dengan tujuan penelitian. Peneliti memilih informan yang memiliki pemahaman, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan SID. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Masyarakat Pengguna Pemerintah Desa Kureksari, yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan dan pelaksanaan SID. Ia terpilih karena memiliki pengetahuan yang baik tentang kebijakan, tantangan, dan implementasi SID Engineering secara keseluruhan dalam konteks pemerintahan desa. Teknik analisis data dalam penelitian ini memanfaatkan teknik analisis Miles dan Huberman. Berdasarkan teknik analisis kedua ahli tersebut, terdapat 4 proses yaitu Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Pemerintah Desa Kureksari, reduksi data yaitu yang bersifat penyederhanaan atau merangkum informasi penting dari data yang telah dikumpulkan, penyajian data bersifat pengumpulan informasi agar informasi atau data dapat disajikan dan dipahami dengan lebih mudah serta menarik dan penarikan kesimpulan yaitu untuk menarik makna atau kesimpulan dari data yang di dapatkan pada proses wawancara pada pemerintah desa kureksari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tahap ini pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemanfaatan teknologi informasi dan pemerintahan berbasis elektronik, pada pasal 86 menjelaskan bahwa setiap desa harus memiliki Sistem Informasi Desa (SID). meskipun undang- undang ini baru muncul pada tahun 2014, pada kabupten sidoarjo penerapannya mulai muncul tahun 2022 Dan masih terdapat desa yang belum menerapkan Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal ini peran pemerintah daerah sangat signifikan dalam melaksanakan pengawasan terhadap desa agar pengendalian Sistem Informasi Desa (SID) berjalan dengan tepat dan terstruktur. Dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Kureksari masih belum stabil karena Pemerintah Desa Kureksari sebelum itu masih banyak kegiatan - kegiatan desa yang membuat desa kureksari masih belum fokus pada Sistem Informasi Desa (SID). jadi untuk pelayanan administrasi mulai dari Surat keterangan domisili, surat nikah, dan lain-lain pelayanan admnistrasi tersebut sudah secara otomatis masuk ke sistem Sipraja. Untuk penerapan website Sistem Informasi Desa (SID) ini terbagi menjadi 3 yaitu : a) Perangkat keras: sitem ini dapat dijalankan melalui komputer atau laptop b) Perangkat lunak: sistem website ini dijalankan dengan menggunakan chrome atau goggle c) Sumber daya manusia: pada penerapan sistem ini dibutuhkan seorang operator atau user yang mampu mengoperasikan komputer untuk menjalankan Sistem Informasi Desa (SID) yang telah di buat. Untuk memasuki lama E-government pada Desa Kureksari ini dapat dilakukan melalui <https://kureksari-warudesa.id/first>.

Sistem Informasi Desa (SID) telah ada mulai tahun 2022 dari regulasi aturan pemerintah. Sistem Informasi Desa (SID) ini merupakan tugas untuk sekretaris desa atau perangkat desa kureksari . Tahun 2022 sekretaris desa Kureksari baru mengetahui bahwa pada tahun 2022 adanya perubahan terkait sistem informasi. Sehingga sekretaris desa kureksari masih belum bisa maksimal dalam Sistem Informasi Desa (SID). jadi dari pemerintahan kabupaten terkait dengan portal di tahun lalu sudah terpenuhi, namun karena adanya perubahan sistem pada tahun 2022 jadi data yang ada di dalam sistem hilang semua. pada Sistem Informasi Desa (SID) kureksari terdapat monografi desa, jumlah penduduk, profil desa meliputi letak wilayah geografi. Pelayanan Sistem Informasi Desa (SID) mulai tahun 2022 hingga saat ini masih ada beberapa masyarakat belum mengetahui terkait Sistem Informasi Desa.

Manfaat

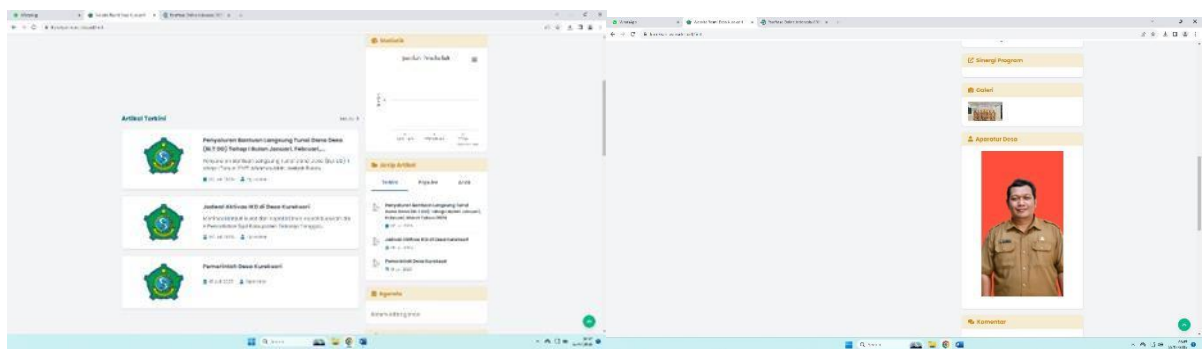
Indrajit (2005) menyebutkan bahwa manfaat E- Government dinilai berdasarkan tingkat aksesibilitas dan penerimaan layanan publik oleh masyarakat. manfaat berhubungan dengan kualitas serta kuantitas layanan yang disampaikan dan bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat dari layanan tersebut. Untuk pemanfaatan teknologi ini menjadi suatu arah dalam tata kelola pada pemerintah Desa Kureksari itu sendiri yang semakin merata

dalam peningkatan kepentingan yang ada dalam keterbukaan informasi yang sangat tepat dan cepat dalam layanan terhadap masyarakat Desa Kureksari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Kureksari, peneliti menanyakan: *“Bagaimana manfaat penerapan Sistem Informasi Desa (SID) bagi pelayanan masyarakat di pemerintah desa kureksari?”* Beliau menjawab, *“Secara konsep, SID sangat membantu karena masyarakat bisa mengakses informasi desa dan pelayanan administrasi tanpa harus selalu datang ke kantor desa. Namun, saat ini pemanfaatannya memang belum maksimal karena masih ada kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia”*.

Selanjutnya, Ketika ditanyakan *“Apakah manfaat SID sudah dirasakan secara langsung oleh masyarakat?”* Beliau menyampaikan, *“Belum sepenuhnya,, kalau sistemnya sudah stabil dan masyarakat paham cara menggunakannya, tentu manfaatnya akan sangat terasa, terutama untuk mempercepat pelayanan administrasi dan meningkatkan keterbukaan infrmasi desa”*. Dari sisi masyarakat, peneliti juga mengajukan pertanyaan: *“Apakah Anda merasakan manfaat dari adanya website SID Desa Kureksari?”* Salah satu masyarakat pengguna menyampaikan, *“Saya masih jarang menggunakan website SID, biasanya langsung datang ke kantor desa atau lewat Spraja. Jadi manfaatnya belum terlalu saya rasakan karena belum terbiasa mengaksesnya”*.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa secara konseptual Sistem Infromasi Desa (SID) memiliki potensi manfaat yang besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi informasi. Namun, dalam praktiknya manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Desa Kureksari. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum stabilnya sistem, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat pemanfaatan oleh masyarakat. Bagi pelayanan masyarakat pemerintah Desa Kureksari, kondisi tersebut dapat dilihat dari tampilan website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Kureksari yang disajikan pada Gambar 2. Gambar tersebut menunjukkan bahwa secara teknis fitur layanan dan informasi telah tersedia, namun pemanfaatannya sebagai sarana pelayanan publik digital masih belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, indikator manfaat dalam penerapan SID Pemerintah Desa Kureksari masih belum optimal dan memerlukan peningkatan, baik dari sisi teknis maupun melalui sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat.



Gambar 2. Tampilan Website SID Desa Kureksari yang berisi menu layanan

Sumber 3 : <https://kureksari-waru.desa.id/> (2025)

Dalam aspek ini adalah untuk supaya memperbaiki penerapan di website Sistem Informasi Desa agar dapat menstabilkan atau supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat Pemerintah Desa Kureksari dan konstitusi. Dalam penerapan Sistem informasi Desa (SID) ini layanannya memiliki beberapa fitur seperti : Profil desa, data penduduk, data laporan anggaran desa dan lain-lainnya. Apabila Sistem Informasi Desa (SID) diterapkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah Desa Kureksari di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, hal ini dapat menjadi teladan bagi desa-desa terpencil di seluruh Indonesia. Pada dasarnya masyarakat membutuhkan informasi atau permohonan melalui Sistem ini. Dan perlu di ketahui karena manfaat dan optimalisasi yang ada masih belum terlaksanakan dengan baik atau belum stabil di pemerintah Desa Kureksari, yang terlihat masyarakat tidak bisa mengakses Sistem Informasi Desa (SID) dalam informasi dan pelayanan melalui website Sistem Informasi Desa yang terkait dengan kualitas sistem informasi yang dibangun dan dijalankan Bersama sesuai landasan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa Kureksari secara konsep sudah memberikan kemudahan akses informasi dan pelayanan administrasi bagi masyarakat, namun dalam praktiknya manfaat tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erwin Mardinata, Tomy Dwi Cahyono, dan Reza Muhammad Rizqi (2023) yang menyatakan bahwa penerapan SID mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akses informasi masyarakat, meskipun dalam implementasinya masih ditemukan kendala seperti keterbatasan infrastruktur dan rendahnya pemahaman sumber daya manusia terhadap teknologi. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat bahwa manfaat SID

akan dapat dirasakan secara maksimal apabila didukung oleh kesiapan sistem dan kemampuan pengelola dalam mengoperasikan teknologi informasi secara optimal.

Efisiensi

Menurut Indrajit (2005), efisiensi dalam penerapan E-Government diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan, mengurangi prosedur yang berbelit, serta menekan penggunaan waktu, biaya dan sumber daya tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Efisiensi menjadi tolak ukur penting untuk menilai sejauh mana sistem digital mampu memberikan kemudahan nyata bagi aparatur pemerintahan maupun masyarakat. Terkait dengan isu yang ada, teknologi memiliki kemampuan untuk mempercepat proses serta meningkatkan mutu layanan publik. Selain itu, implementasi system digital yang efisien juga dapat meminimalkan potensi kesalahan administrasi karena proses dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya berdampak pada percepat layanan, tetapi juga pada peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme dalam tata Kelola pemerintahan.

Dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di pemerintah Desa Kureksari, secara konsep system ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Sekertaris Desa: *“Apakah Penerapan SID sudah membuat pelayanan administrasi menjadi lebih cepat dan efisien?”* Beliau menjawab, *“SID seharusnya bisa mempercepat pelayanan, tetapi karena sistemnya sering error dan server kadang lambat, pelayanan belum bisa sepenuhnya efisien.”* Selanjutnya peneliti bertanya, *“Apakah seluruh pelayanan administrasi sudah dilakukan melalui SID?”* Beliau menjelaskan, *“Untuk pelayanan administrasi saat ini masih banyak yang dibackup melalui aplikasi Sipraja karena system SID belum stabil.”*

Pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa Kureksari telah membantu perangkat desa dalam mempercepat proses pelayanan administrasi kepada masyarakat. Pemanfaatan sistem digital tersebut memungkinkan pengelolaan data kependudukan serta pelayanan surat menyurat dilakukan secara lebih cepat dibandingkan dengan proses manual. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi melalui SID berpotensi meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik di tingkat desa.

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya efisiensi tersebut adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Anggaran atau biaya yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa Kureksari Kecamatan Waru dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan terkait fasilitas, sarana dan prasarana, pemeliharaan, serta pengadaan dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) untuk mendukung pelayanan publik. anggaran tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan pengelolaan sistem serta pemanfaatannya dalam pelayanan administrasi desa. Penilaian aspek efisiensi juga didukung oleh temuan observasi langsung terhadap fitur dan kondisi teknis pad website Sistem Informasi Desa (SID) pemerintah desa kureksari. Observasi ini dilakukan untuk melihat perbandingan waktu pelayanan administrasi sebelum dan sesudah penerapan Sistem Informasi Desa (SID), serta untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut mampu meningkatkan efisiensi pelayanan di Pemerintah Desa Kureksari. Hasil observasi dan wawancara tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 Perbandingan Waktu Pelayanan Administrasi Sebelum dan Sesudah Implementasi SID pemerintah Desa Kureksari

Jenis Layanan	Waktu Sebelum SID (manual)	Waktu Sesudah SID
Surat keterangan Domisili	1-2 hari	30-60 menit
Surat Pengantar Nikah	2-3 hari	1 hari
Surat Keterangan Usaha	1-2 hari	1 jam
Surat Keterangan Tidak Mampu	2 hari	1 hari
Pengajuan KTP	3-7 hari	2-5 hari
Pengajuan Kartu Keluarga	3-5 hari	2-4 hari
Akta kelahiran	5-7 hari	3-5 hari
Akta Kematian	3-5 hari	2-3 hari

Sumber 3 Hasil Wawancara dan Observasi peneliti (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 2 tersebut, dapat diketahui terdapat perbedaan waktu pelayanan administrasi sebelum dan sesudah penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Pemerintah Desa Kureksari. Sebelum adanya SID, pelayanan dilakukan secara manual dengan waktu penyelesaian yang relatif lebih lama, yaitu sekitar 1 hingga 7 hari. Setelah penerapan SID, beberapa layanan seperti surat domisili, surat keterangan usaha, dan surat pengantar nikah dapat diselesaikan lebih cepat, dalam hitungan jam hingga satu hari. Hal ini menunjukkan bahwa SID mampu meningkatkan efisiensi waktu pelayanan. Namun, efisiensi tersebut belum sepenuhnya optimal karena beberapa layanan administrasi kependudukan masih bergantung pada instansi lain serta adanya kendala teknis dan penggunaan aplikasi lain yang mempengaruhi efektivitas pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SID Pemerintah Desa Kureksari telah memberikan dampak terhadap percepatan waktu pelayanan administrasi. Hal ini terlihat dari data pada Tabel 2 yang menunjukkan adanya perbedaan waktu pelayanan sebelum dan sesudah penerapan SID, di mana beberapa layanan administrasi seperti surat keterangan domisili, surat keterangan usaha dan surat pengantar nikah dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan system manual. Namun demikian, efisiensi pelayanan tersebut belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, masih terdapat kendala teknis seperti sistem yang belum stabil, gangguan *server*, serta penggunaan aplikasi lain seperti Sipraja dalam proses pelayanan administrasi. Selain itu, beberapa layanan administrasi kependudukan juga masih bergantung pada instansi lain sehingga belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem SID. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Romi Hendri dan Eva Itma Anna (2024) yang menyatakan bahwa sistem informasi berbasis web mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik apabila sistem tersebut dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks penelitian ini, meskipun (SID) telah menunjukkan adanya peningkatan efisiensi waktu pelayanan, namun pemanfaatannya yang belum maksimal menyebabkan tujuan efisiensi belum sepenuhnya tercapai.

Partisipasi

Menurut Indrajit (2005), partisipasi dalam E- Government diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital serta memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi menunjukkan sejauh mana masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga turut berperan dalam proses komunikasi dua arah dengan pemerintah. Partisipasi tersebut membantu pemerintah mengetahui kebutuhan dan aspirasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin kuat kualitas demokrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap system digital yang diterapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu keberhasilan implementasi E-Government tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam memanfaatkan sistem tersebut.

Berdasarkan Hasil wawancara Dalam Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa Kureksari, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Sekertaris Desa: *“Apakah masyarakat sudah aktif menggunakan dan memanfaatkan SID dalam pelayanan administrasi?”* Beliau menjawab, *“Masih belum sepenuhnya. Beberapa masyarakat masih lebih memilih datang langsung ke kantor desa karena belum terbiasa menggunakan website SID.”*

Selanjutnya peneliti bertanya, *“Apakah masyarakat pernah memberikan masukan atau tanggapan terkait pengguna SID?”* Beliau menjelaskan, *“Ada beberapa yang menyampaikan secara langsung saat datang ke kantor, tetapi untuk melalui website atau fitur digital masih jarang digunakan.”*

Pada hasil wawancara yang dilakukan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa Kureksari mulai terlihat melalui penggunaan layanan informasi yang tersedia serta adanya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan informasi, tetapi juga mulai terlibat dalam memberikan masukan, saran, maupun tanggapan terkait informasi dan pelayanan yang disediakan melalui system tersebut. Partisipasi ini dapat dilihat dari adanya interaksi langsung antara masyarakat dengan perangkat desa Ketika masyarakat menyampaikan kebutuhan informasi, memberikan usulan, maupun menanyakan terkait pelayanan administrasi yang tersedia.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan SID juga menunjukkan bahwa teknologi informasi yang diterapkan oleh pemerintah desa telah membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat. Melalui system tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih mudah diakses serta berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat desa. Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan SID masih perlu ditingkatkan, mengingat tidak semua masyarakat secara aktif memanfaatkan website desa sebagai sumber informasi maupun sebagai sarana komunikasi dengan pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan pemanfaatan system agar partisipasi masyarakat dalam penggunaan Sistem Informasi Desa dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung pelayanan publik yang lebih transparan, efektif dan partisipatif.

Salah satu faktor yang mendukung partisipasi tersebut adalah keterlibatan masyarakat pengguna yang secara aktif memberikan saran atau rekomendasi kepada Pemerintah Desa Kureksari Kecamatan Waru terkait pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID). Melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung antara masyarakat dan pemerintah desa, berbagai masukan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan sistem serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik. Temuan tersebut kemudian diperkuat oleh hasil observasi dan analisis data penggunaan website SID yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Data partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan SID Desa Kureksari Tahun 2024-2025

Tahun	Pengguna Layanan Online	Saran/ masukan melalui SID	Peserta Sosialisasi SID	Total Partisipasi
2024	145 orang	18 Masukan	52 orang	215
2025	210 orang	27 Masukan	76 orang	313

Sumber 5 : Dokumen Administrasi dan laporan Kegiatan SID pemerintah Desa Kureksari (2025)

Berdasarkan pada tabel 3 tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa Kureksari menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 145 orang menggunakan layanan, 18 masukan disampaikan melalui SID, serta 52 orang mengikuti sosialisasi, dengan total partisipasi sebanyak 215. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah pengguna layanan meningkat menjadi 210 orang, masukan melalui SID bertambah menjadi 27, serta peserta sosialisasi meningkat menjadi 76 orang, sehingga total partisipasi mencapai 313.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam keterlibatan masyarakat terhadap pemanfaatan SID, baik dari sisi penggunaan layanan maupun keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi. Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan masyarakat Desa Kureksari, angka tersebut masih tergolong terbatas sehingga partisipasi digital belum sepenuhnya merata. Dengan demikian, meskipun terdapat tren peningkatan partisipasi, indikator partisipasi dalam penerapan SID masih memerlukan penguatan melalui peningkatan sosialisasi, pengembangan fitur interaktif, serta dorongan agar masyarakat lebih aktif menyampaikan aspirasi melalui sistem digital yang tersedia.

Hasil penelitian, Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Sistem Informasi Desa Pemerintah Desa Kureksari masih tergolong rendah, karena sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan website SID dan masih lebih memilih datang langsung ke kantor desa. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erwin Mardinata, Tomy Dwi Cahyono, dan Reza Muhammad Rizqi (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan SID tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital tersebut.

Transparansi

Transparansi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan E-government yang berhasil. Menurut indrajit (2005), transparansi dalam konteks E-Government berarti menyediakan akses yang jelas dan tepat kepada masyarakat terhadap informasi, keputusan, serta proses administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bahwa untuk mengembangkan transparansi pada Sistem Informasi Desa (SID) dapat dengan mudah membantu pemerintah desa dalam hal penyajian informasi secara luas dan terbuka pada masyarakat Desa Kureksari.

Berdasarkan hasil wawancara Dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa Kureksari, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Sekretaris Desa: *“Apakah informasi terkait profil desa, anggaran, dan kegiatan sudah disampaikan secara terbuka melalui website SID?”* Beliau menjawab, *“Informasi dasar seperti profil desa dan beberapa kegiatan sudah ditampilkan, tetapi memang belum semuanya diperbarui secara lengkap dan detail.”*

Selanjutnya peneliti bertanya, *“Apakah masyarakat sudah memanfaatkan website SID untuk memperoleh informasi desa?”* Beliau menjelaskan, *“Masih belum banyak yang mengakses website untuk mencari informasi, sebagian masyarakat lebih sering melihat informasi yang ditempel di papan pengumuman kantor desa.”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa meskipun secara konsep SID dirancang untuk meningkatkan transparansi pemerintahan desa melalui keterbukaan informasi berbasis digital, dalam praktiknya penyajian dan pemanfaatan informasi belum sepenuhnya optimal. Untuk memperkuat temuan hasil wawancara tersebut, peneliti juga melakukan observasi terhadap konten informasi yang tersedia pada website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Kureksari. Observasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana transparansi informasi publik telah diterapkan melalui media digital desa. Hasil pengamatan terhadap beberapa aspek transparansi informasi pada website SID tahun 2024–2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4. Data Tranparansi Informasi Pada Website SID Pemerintah Desa Kureksari 2024-2025

Aspek Transparasi	2024	2025	Keterangan
Publikasi Profil Desa	Tersedia	Tersedia	Lengkap
Publikasi APBDesa	Tersedia (1 kali/ Tahun)	Tersedia (1 kali/Tahun)	Belum detail Realisasi
Berita/Kegiatan Desa	6 Berita	9 Berita	Tidak Rutin Tiap Bulan
Statistik Kependudukan	Tidak Diperbarui	Diperbarui 1 kali	Belum Berkala
Informasi Program pembangunan	Terbatas	Terbatas	Belum Lengkap

Sumber 6: Observasi Website SID Desa Kureksari (2025)

Berdasarkan pada Tabel 4 di atas, aspek transparansi Sistem Informasi Desa (SID) tahun 2024–2025 Pemerintah Desa Kureksari, dapat dijelaskan bahwa tingkat keterbukaan informasi melalui website desa sudah mulai tersedia, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal. Pertama, pada aspek publikasi profil desa, informasi mengenai profil desa telah tersedia baik pada tahun 2024 maupun 2025 dan tergolong lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyediakan informasi dasar seperti sejarah desa, visi dan misi, serta struktur organisasi sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kedua, pada aspek publikasi APBDesa, informasi anggaran desa telah dipublikasikan satu kali dalam satu tahun baik pada tahun 2024 maupun 2025. Namun demikian, informasi yang disajikan masih bersifat umum dan belum menampilkan secara rinci terkait realisasi penggunaan anggaran desa, sehingga transparansi keuangan desa belum sepenuhnya maksimal.

Ketiga, pada aspek berita atau kegiatan desa, terjadi peningkatan jumlah publikasi dari 6 berita pada tahun 2024 menjadi 9 berita pada tahun 2025. Meskipun mengalami peningkatan, publikasi informasi kegiatan desa tersebut belum dilakukan secara rutin setiap bulan sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat masih belum konsisten. Keempat, pada aspek statistik kependudukan, pada tahun 2024 data tidak diperbarui, sedangkan pada tahun 2025 baru diperbarui satu kali. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan data kependudukan masih belum dilakukan secara berkala sehingga informasi yang ditampilkan belum selalu mencerminkan kondisi data penduduk yang terbaru. Kelima, pada aspek informasi program pembangunan, baik pada tahun 2024 maupun 2025 informasi yang tersedia masih terbatas dan belum memuat secara lengkap terkait program pembangunan desa yang sedang maupun yang akan dilaksanakan. Secara keseluruhan, data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa upaya transparansi informasi melalui Sistem Informasi Desa Pemerintah Desa Kureksari sudah mulai berjalan, namun masih terdapat beberapa kekurangan seperti pembaruan informasi yang belum rutin, keterbatasan detail data, serta publikasi program pembangunan yang belum lengkap. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pengelolaan dan pembaruan konten website desa agar transparansi informasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, Keberadaan website Sistem Informasi Desa Pemerintah Desa Kureksari sebenarnya telah menyediakan berbagai informasi seperti profil desa, data kependudukan, dan laporan kegiatan desa sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat. Namun pembaruan data yang belum dilakukan secara rutin menyebabkan fungsi transparansi informasi belum berjalan secara maksimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Arman Arsad dkk (2022) yang menunjukkan bahwa Sistem Informasi Desa berbasis website dapat meningkatkan transparansi pemerintahan desa apabila informasi yang disajikan dikelola dan diperbarui secara berkala.

Menejemen Perubahan

Penerapan teknologi di bidang publik memerlukan menejemen prubahan yang terencana. Indrajit (2005) merekomendasikan pelatihan, penilaian dan penyesuaian teknologi sebagai elemen dari proses perubahan. Bahwa penerapan dalam teknologi informasi pada hakikatnya memberikan kesempatan bagi pemerintah desa menerapkan fasilitas yang ada dalam mempermudah proses pelayanan terhadap penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) Untuk memperkenalkan potensi desa dan hubungan interaktif antara masyarakat Desa Kureksari dan pemerintah desa. Supaya bisa dimanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) diperlukannya proses wewenang yang dapat Menjamin bahwa kualitas sistem yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh operator atau administrator pengguna Sistem Informasi Desa (SID).

Berdasarkan hasil wawancara Dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa Kureksari, kesiapan perangkat desa dalam menghadapi perubahan menuju sistem digital menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kureksari,

peneliti menanyakan: “Apakah perangkat desa sudah mendapatkan pelatihan terkait penggunaan Sistem Informasi Desa (SID)?” Beliau menjelaskan bahwa: “Pelatihan terkait penggunaan SID memang pernah diberikan oleh pemerintah kabupaten, tetapi masih belum dilakukan secara rutin sehingga beberapa perangkat desa masih membutuhkan waktu untuk memahami dan mengoperasikan sistem tersebut secara maksimal.”

Selanjutnya peneliti juga menanyakan: “Apakah terdapat kendala yang dihadapi perangkat desa dalam mengelola SID?” Informan menyampaikan bahwa: “Kendala yang sering dihadapi adalah keterbatasan kemampuan teknis serta banyaknya sistem pelayanan digital yang harus digunakan oleh pemerintah desa, sehingga perangkat desa perlu menyesuaikan diri dengan beberapa aplikasi yang berbeda.” Selain itu, peneliti juga mengajukan pertanyaan: “Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menyesuaikan diri dengan perubahan menuju pelayanan berbasis digital melalui SID?” Informan menjelaskan bahwa: “Pemerintah desa berusaha mengikuti sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, namun masih diperlukan pendampingan dan pelatihan agar perangkat desa dapat mengelola sistem dengan lebih baik.”

Pada hasil wawancara yang dilakukan, proses manajemen perubahan dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa Kureksari masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pemanfaatan sistem tersebut dalam pelayanan publik. Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya perangkat desa yang bertugas mengelola dan mengoperasikan sistem informasi desa. Sebagian perangkat desa masih memerlukan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola sistem berbasis digital, sehingga proses adaptasi terhadap perubahan dari pelayanan konvensional menuju pelayanan berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya berjalan optimal.

Selain itu, pelatihan teknis yang diberikan kepada perangkat desa terkait pengelolaan Sistem Informasi Desa masih tergolong terbatas dan belum dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika hanya dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sehingga belum mampu memberikan pendampingan yang memadai bagi perangkat desa dalam mengoperasikan sistem secara maksimal. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses manajemen perubahan karena perangkat desa membutuhkan pemahaman teknis yang lebih mendalam agar dapat mengelola dan memperbarui informasi secara rutin melalui sistem tersebut.

Hambatan lainnya juga berkaitan dengan penggunaan beberapa sistem aplikasi pelayanan yang berjalan secara bersamaan di lingkungan Pemerintah Desa Kureksari. Banyaknya aplikasi yang harus digunakan oleh perangkat desa menyebabkan proses pengelolaan data dan pelayanan menjadi kurang efisien serta berpotensi menimbulkan kendala teknis, seperti terjadinya gangguan pada sistem website desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelatihan, pendampingan teknis yang berkelanjutan, serta pengelolaan sistem yang lebih terintegrasi agar proses manajemen perubahan dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa. Untuk memperkuat temuan tersebut, peneliti menyajikan data terkait kondisi manajemen perubahan dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa Kureksari yang meliputi aspek pelatihan, tingkat pemahaman perangkat desa, penggunaan sistem, pendampingan teknis, serta integrasi aplikasi pelayanan. Data tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Data Manajemen Perubahan dalam Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa Kureksari 2024-2025

Aspek Manajemen Perubahan	2024	2025	Keterangan
Pelatihan Perangkat Desa	1 kali	2 kali	Belum rutin dan Berkelanjutan
Tingkat Pemahaman SID	Rendah	Cukup	Masih perlu Peningkatan
Penggunaan SID oleh Perangkat	Terbatas	Mulai meningkat	Belum Merata pada semua perangkat
Pendampingan Teknis	Tidak Rutin	Mulai ada	Belum Insentif
Integrasi Sistem Aplikasi	Belum terintegrasi	Belum terintegrasi	Masih Menggunakan beberapa aplikasi berbeda
Adaptasi Terhadap system Digital	lambat	Mulai Berkembang	Masih dalam tahap Penyesuaian

Sumber 7: Hasil Wawancara dan Observasi peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa proses manajemen perubahan dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Pemerintah Desa Kureksari masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari pelatihan yang belum dilakukan secara rutin serta tingkat pemahaman perangkat desa yang masih dalam kategori cukup. Selain itu, penggunaan SID oleh perangkat desa belum merata dan masih terdapat ketergantungan pada beberapa aplikasi lain yang belum terintegrasi. Pendampingan teknis yang belum intensif juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses adaptasi terhadap sistem digital. Meskipun demikian, pada tahun 2025 mulai terlihat adanya peningkatan dalam

penggunaan sistem serta proses adaptasi perangkat desa terhadap teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pelatihan yang berkelanjutan, pendampingan teknis yang lebih intensif, serta integrasi sistem agar proses manajemen perubahan dapat berjalan lebih efektif.

Selanjutnya, upaya perbaikan dalam manajemen perubahan perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik pemerintah desa maupun instansi pendukung seperti pemerintah daerah. Pemerintah desa perlu menyusun program pelatihan yang terjadwal dan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam mengoperasikan SID. Selain itu, diperlukan adanya pendampingan teknis secara intensif agar setiap kendala yang dihadapi dapat segera diatasi dan tidak menghambat proses pelayanan. Integrasi antar sistem aplikasi juga menjadi langkah penting untuk menghindari duplikasi pekerjaan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan pelayanan administrasi. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan proses adaptasi terhadap sistem digital dapat berjalan lebih cepat, penggunaan SID menjadi lebih merata, serta implementasi E-Government Pemerintah Desa Kureksari dapat berjalan secara optimal dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital.

Berdasarkan hasil penelitian, dari aspek manajemen perubahan, penerapan SID Pemerintah Desa Kureksari masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sistem serta kurangnya pelatihan terkait penggunaan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses adaptasi terhadap transformasi digital di lingkungan pemerintahan desa masih memerlukan dukungan yang lebih kuat, baik dari segi peningkatan kapasitas aparatur maupun penguatan sistem. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shintya Kurniawan dan Lailul Mursyidah (2024) yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi dalam pelayanan publik belum optimal karena keterbatasan pemanfaatan teknologi dan belum sepenuhnya digitalnya proses pelayanan administrasi.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi E-Government melalui Sistem Informasi Desa (SID) Pemerintah Desa Kureksari kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa pada indikator manfaat, Sistem ini secara konsep mampu memberikan kemudahan akses informasi dan pelayanan administrasi bagi masyarakat, namun pemanafaatannya masih rendah karena masyarakat belum terbiasa menggunakan layanan digital serta masih terdapat kendala teknis pada sistem. Dari indikator efisiensi, pelayanan administrasi belum sepenuhnya dilakukan melalui SID karena sebagian layanan masih menggunakan sistem lain atau dilakukan secara manual sehingga efisiensi pelayanan belum maksimal. Selanjutnya pada indikator partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan SID masih terbatas meskipun menunjukkan adanya peningkatan penggunaan layanan dan partisipasi dalam kegiatan sosialisasi. Pada indikator transparansi, website SID telah menyediakan informasi terkait profil desa, kegiatan, dan anggaran desa, namun pembaruan informasi belum dilakukan secara rutin sehingga keterbukaan informasi belum optimal. Sementara itu, dari indikator manajemen perubahan, penerapan SID masih menghadapi kendala pada keterbatasan kemampuan sumber daya manusia serta kurangnya pelatihan dalam pengelolaan sistem. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengelolaan sistem yang lebih konsisten agar penerapan SID dapat mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan di tingkat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih saya kepada Pemerintah Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta perangkat desa yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat Desa Kureksari yang telah berpartisipasi dan memberikan masukan dalam penelitian ini..

REFERENSI

- [1] R. Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. 2014, pp. 1–103. doi: 10.1145/2904081.2904088.
- [2] A. Setyawan, A. I. Rochim, and B. Kusbadrijo, “Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Publik Di Pemerintah Desa Wonokerto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur,” *J. Penelit. Adm. Publik*, vol. 2, no. 05, pp. 42–51, 2022
- [3] M. U. Fahri, “Sistem Informasi Desa,” *Sid.Kemendesa.Go.Id*, p. 64, 2020.
- [4] F. Sulistyowati and C. R. Dibyorin, “Partisipasi Warga terhadap Sistem Informasi Desa,” *J. ASPIKOM*, vol. 2, no. 1, p. 579, 2013, doi: 10.24329/aspikom.v2i1.34.

- [5] S. Syaharuddin and M. Ibrahim, "Aplikasi Sistem Informasi Desa Sebagai Teknologi Tepat Guna Untuk Pendataan Penduduk Dan Potensi Desa," *JMM (Jurnal Masy. Mandiri)*, vol. 1, no. 1, p. 60, 2017, doi: 10.31764/jmm.v1i1.14.
- [6] E. Mardinata, T. D. Cahyono, dan R. M. Rizqi, "Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat," *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 2, pp. xx-xx, 2023.
- [7] R. Hendri dan E. I. Anna, "Sistem Informasi Pengenalan Desa Sumber Agung Lampung Utara Berbasis Web," *Jurnal Alih Teknologi Sistem Informasi (JATSI)*, vol. 4, no. 1, April 2024.
- [8] B. A. Arsad, I. K. Ulya, B. S. V. Deanova, B. T. J. Saputri, H. Aulia, L. Rahmah, R. Mu'afar, R. A. Alghifari, S. Anum, dan Z. R. Gibran, "Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) Berbasis Website di Desa Rempek Darussalam Kabupaten Lombok Utara," *Jurnal Warta Desa (JWD)*, vol. 4, no. 2, pp. 91-95, Agustus 2022, doi: 10.29303/jwd.v4i2.184.
- [9] S. Kurniawati and L. Mursyidah, "Efektivitas Sistem Informasi dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo The Effectiveness of Information Systems in Public Service in Kalidawir Village Sidoarjo Regency," *Univ. Muhammadiyah Sidoarjo.*, pp. 1-14, 2024.
- [10] W. A. Fahriza, A. A. Sihabudin, I. Nursetiawan, U. Galuh, and S. I. Desa, "Pengelolaan Sistem Informasi Desa Di Desa Pasirmukti Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya," pp. 2143-2152, 2020, [Online]. Available: [http://36.92.119.93/handle/123456789/1085%0Ahttp://36.92.119.93/bitstream/handle/123456789/1085/108.Wahyu Azis Fahriza.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://36.92.119.93/handle/123456789/1085%0Ahttp://36.92.119.93/bitstream/handle/123456789/1085/108.Wahyu%20Azis%20Fahriza.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- [11] E. S. Rachman and B. Noviyanto, "Pemanfaatan E-Government Pada Desa Wonokarto Untuk Meningkatkan Akurasi Dan Informasi Potensi Desa," *Technol. Accept. Model*, vol. 8, no. 1, pp. 45-50, 2017.
- [12] Imran, "Implementasi Ajamma (Ajang Aspirasi Masyarakat Makassar) Melalui E-Government Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik DPRD Di Kota Makassar," 2020.
- [13] R. Tohopi and P. A. Hulinggi, "Penerapan E- Government Melalui Kebijakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Berbasis Website Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato," *PUBLIKA J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 9, no. 1, pp. 14-24, 2023, doi: 10.25299/jiap.2023.vol9(1).11130.
- [14] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. 2020.
- [15] A. Fattah, *metode penelitian kualitatif*, vol. 11, no. 1. 2023.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.